



DOKUMEN NOTULENSI KUPI II

Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia

Hari/Tanggal	: Jum'at, 25 November 2022	Kegiatan	: Halaqah Paralel Sesi 2
Waktu	: Pukul 15.30 - 17.00 WIB	Tempat	: Halaqah Paralel Sesi 2 Kelas 11
Notulis	:		
Tema Kegiatan	: <i>Peran PSGA dalam Gerakan Keulamaan Perempuan Indonesia</i>		

Moderator : **Dr. MUFLIHA WIJAYANTI**

- Narasumber** :
1. **Prof. ATUN WARDATUN, Ph.D.**: Kelembagaan PSGA dalam mendorong terwujudnya PTRG
 2. **KHASAN UBAIDILLAH, S.Pd., M.Pd.I.**: PMA penanganan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan.
 3. **Prof. ALIMATUL QIBTIYAH, S.Ag.,M.Si.,Ph.D.**: Regulasi penanganan kekerasan seksual
 4. **YUNIATI CHUZAIFAH**: Peran PSGA dalam Gerakan Keulamaan Perempuan Indonesia

Halaqah Paralel Sesi 2

Peran PSGA dalam Gerakan Keulamaan Perempuan Indonesia

Pembukaan: Irma Yuliani

===== **Pemutaran Video Pembuatan Dokumen Indikator PTRG** =====

IRMA YULIANI: Kita melakukan beberapa pertemuan luring dan juga daring—untuk menindaklanjuti hasil pertemuan luring. Kita bertemu pertama kali secara luring di Surakarta. Pada pertemuan itu kita berusaha menyamakan persepsi dan cara berpikir untuk merumuskan indikator Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) dan membahas indikator kelembagaan PSGA dan profil gender. Kita mengadakan pertemuan kedua di Semarang dan membahas indikator tridarma perguruan tinggi responsif gender. Kita melanjutkan perumusan indikator tata kelola dan budaya nirkekerasan di pertemuan ketiga di Lampung. Kita menghadirkan para pejabat kampus—Warek 1, Ketua LP2M, dan

lainnya pada pertemuan keempat di Jakarta dan memaparkan hasil dokumen kami di hadapan mereka. Setelah draf dokumen ini sudah jadi, kita mencoba mempromosikan kepada pemangku kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Kita melakukan pertemuan terakhir di Surakarta untuk memfinalisasi draf yang sudah disusun.

NINGSIH FADHILAH:

Kita—dibantu Mbak Desti sebagai fasilitator- menggunakan metode pendidikan orang dewasa, lesehan, dan pendekatan feminis ketika bertukar pengalaman dan pikiran untuk penyusunan dokumen indikator PTRG. Pendekatan feminis mencoba mengekstraksi pengalaman masing-masing delapan perguruan tinggi aliansi ini dan menjadikannya sebagai sebuah pengetahuan dan teori dasar. Itu akan disajikan dalam dokumen operasionalisasi PTRG. Saya bangga bisa menjadi bagian dari tim yang merumuskan operasionalisasi dokumen PTRG. Di samping melakukan pertemuan-pertemuan, kita juga melakukan advokasi dan audiensi kepada para pemangku kebijakan. Kita melakukan audiensi dengan KPPPA pada pertemuan di Solo. Sebetulnya dokumen PTRG yang berisi sembilan indikator itu disusun oleh KPPPA. Kita kemudian merampingkannya menjadi empat indikator. Kita juga melakukan advokasi ke Pak Suwendi (Kasubdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenag) pada pertemuan di Semarang. Pak Wendi mengapresiasi dokumen ini dan akan mengawalinya sehingga bisa menjadi SK Dirjen Pendis atau SK Kemenag.

Kita juga melakukan audiensi dengan Kedutaan Kanada (GAC) sebagai donor program We Lead. We Lead adalah konsorsium yang terdiri atas tujuh organisasi sipil, yaitu Rumah KitaB, JASS, Hivos, Rahima, Fahmina, FAMM Indonesia, dan Perempuan Mahardhika. Mereka merangkul kami untuk merumuskan operasionalisasi indikator PTRG. Kita juga melakukan audiensi dengan para pimpinan perguruan tinggi—Warek 1, ketua LP2M, Komnas Perempuan, KPPPA- pada saat pertemuan di Jakarta. Kita menyampaikan hasil draf yang sudah kita susun di hadapan mereka dan kemudian menyerahkannya kepada GAC. Kita juga menghadiri Konferensi PSGA, sebagai acara Pra-KUPI, di Palembang. Pada pertemuan itu pemerintah memberikan apresiasi PTRG Award—ini baru ada di PTKI dan belum ada di PTU- bagi perguruan tinggi yang sudah berupaya memenuhi indikator-indikator PTRG. Gaung PTRG sudah semakin menggeliat. Kita berharap, PTRG menjadi bagian penting dalam perguruan tinggi. Ke depan kita akan melakukan audiensi ke BAN-PT atau Lamdik sehingga PTRG menjadi indikator dalam akreditasi perguruan tinggi.

MODERATOR: MUFLIHA WIJAYATI

Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) adalah peta jalan atau panduan bagi PSGA untuk mengawal perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi yang responsif gender. Implementasinya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing perguruan tinggi. Tema halaqah kita adalah Peran PSGA dalam Gerakan Keulamaan Perempuan Indonesia. Tema ini selaras dengan tema utama KUPI 2 Meneguhkan Peran Ulama Perempuan untuk Peradaban yang Berkeadilan'. Topik diskusi kita adalah: 'Siapa itu ulama perempuan? Benarkah PSGA bagian dari ulama perempuan? Bagaimana penguatan kelembagaan PSGA untuk menjalankan peran-peran keulamaannya? Apa kontribusi PSGA dalam mengadvokasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)?'

Ada tiga narasumber yang akan menemani kita dalam halaqah ini, yaitu Yuniyanti Chuzafah (aktivis HAM Perempuan, Komisioner Komnas Perempuan 2010-2014), Alimatul

Qibtiyah (Guru Besar Bidang Kajian Gender UIN Yogyakarta, Komisioner Komnas Perempuan 2020-2024), dan Khasan Ubaidillah (ulama perempuan dari Jaringan PSGA, Kapus PSGA UIN Surakarta, Pemenang PTRG Award). Kami ingin mendengar pandangan dan pengalaman dari para pakar terkait bagaimana PSGA punya otoritas untuk dikatakan sebagai bagian dari jaringan ulama perempuan. Beberapa hari lalu kita mengadakan Konferensi PSGA di Palembang—sebagai kegiatan pra-KUPI 2. Banyak teman-teman dalam forum itu yang merasa tidak percaya diri dan ragu ‘Apakah benar kita bagian dari ulama perempuan?’

Saya ingin mendengar pandangan Mbak Yuni terkait ‘Ulama perempuan dan perempuan ulama itu seperti apa? Mengapa harus ditegaskan kata ‘perempuan’ baik di depan maupun di belakang kata ‘ulama’.

YUNYANTI CHUZAIFAH:

Perempuan ulama adalah mereka yang secara biologis perempuan, punya kapasitas dan diakui sebagai seorang ulama. Perempuan ulama sangat jarang. Di Majelis Tarjih misalnya, perempuan ulama seperti Mbak Alim hanya 6%. Beberapa perempuan ulama juga mulai masuk ke Bahtsul Masail NU. Sebetulnya ada banyak perempuan ulama yang sangat pintar. Dalam praktiknya, istilah yang digunakan adalah ulama perempuan. KUPI mendefinisikan ulama perempuan dengan mereka yang punya komitmen dan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan gender. Ulama perempuan bisa perempuan dan bisa juga laki-laki karena ulama perempuan bukan hanya sekedar persoalan biologis semata, tetapi juga kesadaran. Ulama perempuan adalah siapa saja yang punya kesadaran transformatif untuk melihat ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki dan berusaha memperjuangkannya dengan interpretasi, tafsir, dan pemahaman agama. Definisi ini bukan lah definisi yang rigid seperti juklak karena ia bisa berkembang.

Meski ada ulama laki-laki dalam ulama perempuan, namun semangatnya adalah memperbanyak ulama yang secara biologis perempuan dan bagaimana agar mereka juga diakui. Sebetulnya tidak sedikit ulama perempuan yang punya karya bagus dalam literatur, namun karena secara kultur akademik—misalnya kutipan- harus menggunakan nama keluarga maka nama yang muncul adalah nama bapaknya atau kakeknya. Nama ulama perempuan dalam literatur dikubur bukan karena karyanya, tetapi politik kutipan yang sangat maskulin. Hal itu lah yang membuat jumlah ulama perempuan seolah-olah sedikit. Saat saya menjadi gender advisor dalam proses peralihan IAIN ke UIN, ada teman yang mempublikasikan 100 sahabat Nabi dan semuanya adalah laki-laki. Saya menegaskan bahwa saya tidak mau menandatangani karena buku tersebut hanya menampilkan sahabat laki-laki saja. Prof Azra mengatakan bahwa itu hanya persoalan teknis. Menurut saya, itu bukan persoalan teknis, tetapi ideologis karena buku itu hanya mengakui sahabat laki-laki saja sehingga seolah-olah tidak ada sahabat perempuan. Secara metodologis juga bias karena metodenya menggunakan afiliasi geografis dan juga politis—yang bersifat publik. Saya menegaskan bahwa saya akan menerbitkan buku tersebut jika sudah direvisi. Itu adalah bagian dari pengakuan keulamaan sahabat dan pegiat politik perempuan pada masa Nabi.

Ciri khas ulama perempuan adalah kolektivisme. Dia tidak muncul hanya dirinya saja. Dia melakukan sintesa dan analisa bersama dari multiperspektif. Saya melihat, itu lah kekuatan KUPI. Saya bertemu dengan Grand Syekh al-Azhar di Kairo dan bertanya ‘Kenapa sunat perempuan tidak diperbolehkan dan bahkan dianggap kriminal di Mesir?’ Semula

ketika para ulama membuat fatwa dengan hanya berbasis teks-teks agama, sunat perempuan seakan dimungkinkan untuk dilakukan. Namun ketika mereka memanggil para saintis dan ahli medis, mereka baru mengetahui bahwa ada jutaan syaraf dalam klitoris perempuan. Ketika dipotong kecil, mereka sebetulnya sedang memotong organ tubuh perempuan. Hal itu berbeda dengan sunat laki-laki, yang hanya memotong sepuccuk daging yang tidak ada fungsinya dan bukan bagian dari organ. Karena yang dipotong adalah organ maka ada bayi perempuan yang meninggal karena disunat. Berdasarkan temuan kami, tidak sedikit yang mengalami frigid akibat sunat perempuan. Itu sebetulnya juga melanggar hak asasi anak karena orang tua menyunat organ anaknya tanpa izin dari anaknya. Padahal anak tersebut lah yang akan menanggung hal itu seumur hidupnya.

Saya pernah memarahi anggota MUI—adik kelas saya. ‘Apakah kamu mau bertanggung jawab jika perempuan Indonesia mengalami frigid akibat sunat perempuan. Belum tentu Anda masuk surga karena itu.’ Mesir kemudian mengkriminalkan, memenjarakan, dan menutup praktik siapa saja yang melakukan sunat perempuan. Dulu saat keulamaan perempuan belum menggeliat, saat saya, Mbak Lies, dan Kiai Husein tergabung dalam program Fiqhun Nisa, mani saja adalah hidup sehingga mencabut penis sebelum ejakulasi (*azl/ coitus interruptus*) tidak diperbolehkan karena itu dianggap membunuh jutaan hidup. Setelah ada mikroskop, baru diketahui bahwa itu akan hidup setelah sekian bulan. Tumbuh dan hidup harus dibedakan. Itu berdampak pada konsep aborsi ‘Kapan nyawa itu ada?’. Kolektivisme dan sintesa berbagai pengetahuan menjadi sangat penting. Keulamaan perempuan tidak eksklusif dengan dirinya sendiri.

Ciri khas ulama perempuan lainnya adalah peduli merespons isu-isu sosial, terutama isu perempuan, yang selama ini tidak dianggap oleh ulama mainstream. Ada sebuah film karya Asrul Sani tentang seorang perempuan yang status pernikahannya digantung oleh suaminya. Ia tidak ditalak dan juga tidak boleh menikah. Perempuan itu datang ke ulama dan ulama menyalahkannya. Ia merasa tidak mendapatkan dukungan dari ulama siapa pun. Akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari Islam. Berdasarkan data pengadilan agama, ada banyak orang yang keluar dari Islam karena mereka tidak terlindungi oleh hukum, nilai, atau ajaran Islam. Ia semula masuk Islam karena pernikahan. Namun karena suaminya mengancam, termasuk akan melakukan poligami, ia kemudian kembali memeluk agama lamanya. Pengadilan agama mencatatnya sebagai murtad. Cara beragama kita tidak ramah terhadap perempuan. Ulama perempuan berperan untuk merangkul dan merespons isu-isu perempuan yang dipinggirkan oleh ulama mainstream. Kalau ulama perempuan punya fatwa, fatwanya harus melindungi perempuan.

Poin lainnya adalah ulama perempuan punya pengetahuan yang mumpuni dan memahami keakaran—Al-Qur’an, Hadits, sejarah. Mereka juga harus memahami hak asasi dan konstitusi. Jika konstitusi dibangun oleh kolektif atau majoritarianism yang tidak memahami hak asasi maka itu bisa memunculkan totalitarianism. Perancang konstitusi harus punya semangat hak asasi manusia. Poin lainnya adalah ulama perempuan harus melahirkan pengetahuan yang transformatif. Ulama perempuan bukan hanya sekadar menulis tulisan yang statis, menyampaikan dalil-dalil, tetapi harus melahirkan pemikiran dan teori baru. Ciri ulama perempuan lainnya adalah bijak atau sensitif. Mereka tidak menyalahkan dan memojokkan orang yang datang mengadu. Hasil riset di FB saya menunjukkan, teman-teman migran datang ke ulama dan bertanya ‘Bagaimana kalau saya punya problem seksual.’ Ulama menjawab ‘Kamu berpuasa saja.’ Sementara laki-laki bertanya ‘Bagaimana kalau saya punya problem seksual dengan istri saya yang sedang

bekerja migran?’ ‘Kamu boleh poligami.’ Hal lainnya yang penting adalah ruang amplifikasi—itu akan dijelaskan pada kesempatan selanjutnya.

MUFLIHA WIJAYATI: Jika melihat prasyarat yang disampaikan Mbak Yuni tadi, kita setuju PSGA disebut sebagai bagian dari jaringan ulama perempuan. Ada tiga atau empat Kapus PSGA yang laki-laki. PSGA punya kepedulian pada isu perempuan. Kita mengakar pada norma-norma dalam Islam dan juga mempertimbangkan konstitusi. Bagaimana agar PSGA bisa memainkan peran keulamaannya dan menjadi ulama yang mumpuni dan otoritatif?

YUNYANTI CHUZAIFAH:

Menjadi ulama itu bukan seperti diakreditasi. Itu adalah label komunitas atau pihak luar kepada kita. Kita tidak perlu bingung dan sibuk sudah layak disebut ulama atau tidak, ‘Aku sudah layak disebut ulama atau belum?’ Menurut saya, PSGA punya ruang strategis dan sangat dimungkinkan untuk disebut sebagai ulama. Jika apa yang dikerjakan teman-teman, meski tidak menggunakan bahasa Arab, diterapkan maka banyak kampus dengan ribuan mahasiswa akan melakukan perubahan sosial. Fungsi fatwa adalah merespons situasi sosial dengan mencantumkan dalil Al-Qur’an, Hadits, asbabun nuzul, asbabul wurud, dan lainnya. Teman-teman juga pasti menggunakan keakaran Islam dalam menyusun dokumen ini. Itu kemudian ditransformasikan pada realitas sosial berdasarkan pada konteks perguruan tinggi. Menurut saya, apa yang dilakukan teman-teman setara dengan melahirkan pandangan keagamaan sebagai penyelesaian problem sosial.

Bagaimana agar PSGA disebut sebagai ulama? Apa saja yang perlu dilakukan? Teman-teman perlu responsif terhadap isu-isu sosial dengan bacaan-bacaan kritis dan memperbanyak produksi pengetahuan dengan pendekatan yang unik—berbeda dengan keulamaan-keulamaan yang lain. Pengalaman perempuan menjadi salah satu *core* kunci dalam produksi pengetahuan. Selama ini pusat pengetahuan bukan berasal dari perempuan. Pengalaman perempuan yang non-akademik dianggap tidak pengetahuan. Padahal pengalaman perempuan adalah sumber pengetahuan yang paling utama. Teman-teman tentu sudah melakukan banyak hal terkait hal itu seperti penelitian. Hanya itu harus dilakukan dengan perspektif gender yang baik. Mendengarkan perempuan bukan berarti sudah berperspektif gender karena itu hanya melibatkan atau menyertakan. Belum tentu mendengarkan perempuan dibarengi dengan menggunakan perspektif gender yang baik—dari substansi hingga posisi pertanyaannya. Proses berfatwa juga seperti itu; mendengarkan akar masalahnya dulu dan kemudian mencari solusinya.

Perbedaan keulamaan KUPI dengan keulamaan yang lainnya adalah, hasil-hasil fatwa KUPI dilanjutkan menjadi proses gerakan. Saya diminta untuk mereviu digital KUPI 1. Fatwa tentang larangan kawin di usia anak menjadi menarik karena ia dibunyikan oleh banyak pihak. Ulama-ulama menyampaikannya dalam ceramah-ceramahnya. Mereka yang duduk di pemerintah juga membuat perda-perda. Fatwa itu juga menjadi amunisi bagi mereka untuk mencegah kawin anak ketika ada yang bertanya kepadanya. Kata-katanya bernyawa dan tidak sekadar menjadi deretan huruf yang berdebu di rak. Itu dibunyikan untuk menyelesaikan problem yang riil dihadapi oleh perempuan. Teman-teman punya basis riset. Riset adalah upaya untuk mengecek realitas sosial. Ada banyak rongga riset terkait isu-isu penting yang masih kosong misalnya dampak poligami pada anak. Selama ini kita menggunakan perspektif perempuan dan itu seakan-akan tidak

mempan. Kita bisa menggunakan perspektif anak. Dampak poligami itu multigenerasi.

Tema riset lainnya adalah dampak poligami pada kiai dan bunyai. Itu juga menimbulkan konflik yang bergenerasi. Bagaimana kontribusi kekerasan terhadap perempuan bagi munculnya radikalisme. Di Bangladesh radikalisme muncul karena peran ibu yang dianggap kurang. Saya melihat, radikalisme muncul di Indonesia karena kekacauan peran bapak. Saya menemukan tiga tokoh radikal yang kecewa dengan bapaknya yang melakukan kekerasan, tidak pernah memeluk anaknya, dan melakukan poligami. Kehebatan dari ulama perempuan adalah riset-riset yang transformasional dan profetik—bukan hanya teori saja tetapi juga mampu melakukan perubahan.

Dulu ulama membuat fatwa dan kemudian menyebarkannya melalui teks. Sementara orang-orang sekarang mendapatkan pengetahuan melalui digital. Teman-teman tidak perlu minder menjadi ulama ketika tidak punya pesantren atau umat karena teman-teman punya pesantren yang besar dan santri yang banyak di kampus. Teman-teman juga membangun pesantren di media sosial. Menurut saya, PSGA punya ruang yang sangat besar untuk menyebut dirinya atau mendapat pengakuan sebagai ulama perempuan.

MUFLIHA WIJAYATI: Kita akan mendengar pengalaman Mas Khasan dalam mengadvokasi dan merawat kelembagaan PSGA di UIN Surakarta. Peran apa saja yang sudah dimainkan oleh PSGA UIN Surakarta? Apa tantangan yang dihadapi oleh PSGA UIN Surakarta untuk melaksanakan peran-peran itu?

KHASAN UBADILLAH:

Kita jangan pernah mengabaikan tridarma perguruan tinggi ketika membicarakan PSGA sebagai bagian dari keulamaan perempuan. Itu adalah bagian kunci ketika kita ingin memperbanyak produksi pengetahuan dan juga mempraktikkannya dalam pengabdian. Saat ini ada upaya integrasi penelitian, pendidikan dan pengajaran, dan pengabdian. Kita bisa memaksimalkan itu untuk meneguhkan PSGA sebagai bagian dari jaringan keulamaan perempuan. Sebetulnya PSGA punya peran dan posisi yang sangat strategis di kampus karena bisa masuk ke semua segmen. Persoalannya muncul ketika PSGA berhadapan dengan banyak orang yang perspektifnya tidak selaras dengan apa yang diupayakan PSGA. Kita punya jalan yang sangat lebar untuk mengeksekusi semuanya, namun karena belum ada kesepahaman antara PSGA dengan pihak-pihak lain di kampus terkait keadilan gender maka ada beberapa hal yang menjadi terhambat. Misalnya teman-teman di Solo sedang mencoba mengafirmasi penelitian yang responsif gender. Kita menginsersi tema-tema tentang gender dan memasukkannya ke dalam satu klaster interdisipliner. Ada anggaran untuk tema-tema yang sudah kita tentukan di awal tersebut. Kita juga mengafirmasi tema-tema gender dalam pengabdian berbasis komunitas dan itu masuk ke dalam satu klaster.

Tidak semua yang kita upayakan berhasil dan sesuai harapan. Ketika kita membuka peluang itu, orang yang mengaksesnya tidak sesuai dengan keinginan kita. PSGA tidak bisa bekerja sendiri. Kita tidak hanya melakukan afirmasi saja, tetapi juga mengembangkan kapasitas warga kampus untuk memahaminya—bahwa itu adalah ruang terbuka dan menunjukkan cara mengaksesnya. Kita kemudian mengadakan workshop, diskusi, dan sejenisnya agar para pemangku kebijakan punya perspektif yang sama. Integrasi penelitian, pengabdian, serta pendidikan dan pengajaran yang responsif gender merupakan jalan untuk menciptakan ruang keberpihakan kepada semua pihak di kampus.

Jika PSGA tidak menyentuh penelitian, pengabdian, serta pendidikan dan pengajaran, ia akan menjadi macan ompong dalam upaya-upaya ini. Ketika kita berbicara tentang PPKS, itu tidak akan berjalan tanpa adanya pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengajaran. Kita akan susah mendiskusikan dan membentuk tata kelola yang responsif gender apabila tidak ada kajian terkait hal itu.

PSGA tidak boleh berjalan sendiri dan harus bersinergi dengan semua pihak, termasuk ke pemerintah daerah. Terkadang PSGA merasa tidak punya partner dan terkadang pemerintah daerah juga punya kekosongan terkait gender. Kita tahu bahwa KPPPA punya Anugerah Parahita Ekapraya (APE)—penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas komitmennya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kita bisa mengisi kekosongan daerah tersebut dengan produk penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Itu akan meningkatkan nilai daerah tersebut.

PSGA jangan hadir sebagai lembaga yang dipimpin oleh orang yang dipilih dengan terpaksa. PSGA harus hadir sebagai jaringan keulamaan perempuan dan dikelola oleh orang yang punya perspektif yang mendukung itu. Ketika merumuskan operasionalisasi indikator PTRG ini, kita tidak ingin PSGA menjadi salah kelola karena pimpinan tidak memahaminya. Karena itu, perguruan tinggi perlu punya Surat Keputusan Pengarusutamaan Gender (SK PUG) yang juga mengatur secara detail mengenai prasyarat menjadi Kapus PSGA, peran PSGA untuk mengafirmasi semua bagian, dan keterlibatan PSGA dalam pengelolaan. Jika itu berjalan, semua kampus punya peluang yang sama untuk menjadikan PSGA leading sector gender—yang semangatnya menyebar ke semua bagian di perguruan tinggi. Jika itu terjadi, kampus tidak hanya menjadi tempat mencari ilmu, tetapi juga kampus mengadvokasi hal-hal yang perlu diadvokasi sehingga semua warga kampus menjadi terwakili dan terlindungi.

MUFLIHA WIJAYATI: Bagaimana pandangan Prof Alim terkait keulamaan perempuan PSGA dan orang-orangnya? Sejauh mana kebijakan PPKS yang sudah diadvokasi oleh Komnas Perempuan bisa berjalan efektif di perguruan tinggi? PPKS menjadi pintu masuk kami untuk mendiskusikan PTRG. Kita tidak akan bisa melaksanakan sistem PPKS tanpa memperbaiki sistem pengetahuan isu-isu gender di kampus.

ALIMATUL QIBTIYAH:

Saya akan mulai dengan pantun: 'Jalan-jalan ke Jepara/Jangan lupa berkhidmat dan berkongres di KUPI/Hai bestie semuanya/Kita semua percaya PSGA ulama perempuan yang sejati.' Saya termasuk pelaku sejarah karena kita punya inisiatif untuk mendirikan PSW UIN Yogyakarta pada 1995 dan kita sekarang masih berada di grup yang sama sehingga sejarah itu tidak terputus. Saya sudah menulis tentang PSW di jurnal internasional yang terbit di Pakistan. Orang-orang PSW adalah intelektual dan juga aktivis. Aktivisnya adalah berusaha mengimplementasikan kepemimpinan feminis. Kepemimpinan feminis adalah kepemimpinan yang kolektif-kolegial, tidak maju sendiri, punya empati yang besar, dan inklusif. Jika ada undangan dan ia terus yang datang, itu tidak mencerminkan kepemimpinan feminis.

Corak gerakan lainnya PSW adalah produksi pengetahuan sangat kuat sekali. Salah satu buku babon yang diterbitkan PSW pada 2000 adalah buku *Perempuan Tertindas? Kajian*

Hadis-hadis Misoginis karya Hamim Ilyas dkk. Dalam buku itu, saya sudah menulis tentang 'Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual' dan itu berlaku untuk perempuan dan juga laki-laki. Mas Faqih kemudian menamainya dengan istilah mubadalah. Sebetulnya itu adalah tradisi yang sudah lama. Bahkan sebelum kemerdekaan, Maria Ulfah sangat progresif terkait isu-isu perempuan. Gerakan 1990-an menguatkan kembali, bukan sesuatu yang baru sama sekali jika kita melihatnya dari sejarah keulamaan dan intelektual perempuan. PSW UIN selalu punya *project library* di setiap *project* yang ada untuk memperkuat produksi pengetahuan—harus ada sekian persen anggaran untuk membeli buku. Pada 2007 saya berangkat ke Kanada. Dua koper besar saya berisi buku. Saya setiap hari belanja di Amazon.com. Dari upaya itu kita punya buku yang lengkap di perpustakaan dan juga ahli yang mumpuni sehingga kita membuka S-2 Islam dan Kajian Gender di UIN Yogyakarta—meski tidak populer.

Pada awal 2000-an PSW UIN Yogyakarta sudah berpikir sesuatu yang tidak terpikirkan dan tidak tersentuh. Yaitu bolehnya imam shalat perempuan bagi laki-laki dewasa. Itu kemudian dibawa dan ditarjih di Munas Muhammadiyah di Malang pada 2010. Dokumen itu masih menunggu untuk dicap hingga hari ini. Kita berharap itu segera dilegalisasi. Itu berawal dari kampus karena ada orang yang mendiskusikan itu di kampus. Dalam konteks Indonesia, kita melihat laki-laki sebagai partner untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam penelitian disertasinya saya, tidak ada responden yang mengatakan bahwa laki-laki adalah musuh. Meski itu tidak menjadi mainstream di gerakan di luar sana, namun ada pihak yang menggunakan narasi itu untuk menarasikan negatif gerakan perempuan. Ketika perempuan meminta hak perempuan maka seolah-olah 'Ya kamu perempuan makanya kamu minta itu.' Karena itu, Kita melibatkan dan bekerjasama dengan laki-laki untuk memperjuangkan hak perempuan. Caranya, kita meminta rektor dan wakil rektor untuk memberikan pidato kunci, namun poin-poinnya kita yang membuat dan kita membawakannya banyak buku tentang gender kepadanya. PSW menggunakan strategi itu karena kita tidak mungkin melatih rektor dan para wakil rektor.

Kita juga bekerjasama dengan Badan Peradilan Agama (Badilag) untuk melatih para hakim dan pengurus KUA. Semula kita kesulitan menghadirkan para hakim. Kita kemudian mengirimkan surat kepada Badilag secara langsung dan Badilag mengutus hakim untuk mengikuti pelatihan kita. Cara tersebut berhasil. Kita perlu menggunakan cara-cara kreatif dan strategis untuk mengukuhkan ulama perempuan dalam semua lini kehidupan. Gerakan PSW memang solid namun ada dinamika karena—salah satunya- ada aturan-aturan yang harus masuk struktural dan ada yang memilih tidak. Setiap pertemuan PSW selalu ada keluhan terkait tidak adanya anggaran dari kampus. Akhirnya itu dimasukkan ke dalam struktur. Namun dalam beberapa kasus, pimpinan yang tidak punya perspektif yang mengisi PSW/PSGA, bukan aktivis perempuan. Sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terlepas itu masuk ke dalam struktural atau tidak, gerakan perempuan di kampus akan mulai hidup lagi.

Teman-teman PSGA relatif punya gerakan yang stabil karena mereka adalah PNS. Bagi teman-teman yang bergerak di organisasi sipil, G20 di Indonesia punya dampak besar, terutama terkait dukungan donor internasional pada gerakan perempuan. Namun karena orang-orang PSW adalah PNS, mereka tinggal memikirkan ide dan gerakannya. Kita tidak terlalu mencari kehidupan dalam gerakan kita. Kita mengakui adanya dukungan-dukungan dari pemerintah, baik dari Kemenag, KPPPA, Komnas Perempuan, Badilag, dan civil society. Menurut saya, ulama perempuan memang berasal dari PSW/PSGA karena

kita sudah bergerak sejak pertengahan 1990-an, termasuk menerjemahkan buku-buku yang ada.

Strategi bagi ulama akademisi untuk menorehkan perempuan menjadi lebih baik adalah: *Pertama*, ulama perempuan akademisi atau intelektual PSW/PSGA mencoba mengakui keberagaman dari pengalaman-pengalaman perempuan yang ada. Kita meyakini apa pun latar belakang dari pada konstruk sosial penafsiran yang mereka yakini tanpa harus memasukkan orang lain ke neraka. Misalnya kita mencoba memahami isu pernikahan tanpa anak (*child free marriage*). Saya juga tidak pernah mendengar aktivis perempuan dari PSGA memaksa orang lain memakai jilbab. Itu yang membedakan dengan yang lainnya. *Kedua*, pendekatan yang digunakan oleh gerakan perempuan di kampus adalah pendekatan sejarah dan hermeneutika. Kita mengkaji asbabun nuzul, asbabul wurud, dan setiap landasan bayani untuk dijadikan advokasi.

Ketiga, gerakan perempuan di kampus juga penting memilih bayani, burhani, dan irfani. Kita tidak penting menghafal banyak teks, cukup menghafal ayat-ayat terkait isu perempuan secara fasih. Landasan bayani menjadi penting karena itu powerful. Terkait burhani, berdasarkan penelitian Rifka Annisa dengan UGM, anak punya kecenderungan melakukan kekerasan ketika tidak ada ayah dalam pengasuhan. Sekarang ada diskusi tentang pengasuhan ayah. Jika menggunakan bayani, ada hadits “Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanyalah (ayah dan ibunya, bukan hanya ibunya saja) yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani.” Surat pendidikan adalah Surat Luqman, bukan al-Nisa. Namun kenapa pengasuhan menjadi kewajiban ibu? Itu dibuktikan oleh risetnya Rifka Annisa—beban pengasuhan dan kerja domestik perempuan itu meningkat dua sampai tiga kali lipat saat pandemi. Ada gap antara nilai yang ada dalam Al-Qur’an dengan realitas yang ada. Irfani bertitik tolak pada hati nurani. Gerakan PSW berhasil karena memadukan ayat-haditsnya, hasil penelitian, dan hati nurani ‘Bagaimana jika itu terjadi pada anak perempuanmu atau ibumu?’

Terakhir, etic dan silent revolution. PSW melengkapi teman-teman yang berjuang di jalan dan kita mencoba berjuang melalui intelektual. Mengubah mental model memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Etiknya menggunakan perspektif ‘Aku shalat, aku pakai jilbab karena aku nyaman.’ Namun kita tidak harus memasukkan orang yang tidak shalat atau tidak berjilbab ke neraka. Orang-orang tekstual konservatif sudah mengapling surga-neraka. Kita tetap shalat namun kita tidak mengapling surga-neraka. Kita juga mengimplementasikan ajaran agama sebagaimana mereka, namun alasannya (*reason*) dan dampaknya terhadap relasi sosial berbeda.

===== Sesi Tanya-Jawab =====

1. **LAILA (Malang):** Bu Yuni menceritakan bahwa Prof Azra mempermasalahkan buku tentang sahabat Nabi yang tidak melibatkan sahabat perempuan. Saya menemukan buku *Ensiklopedia Wanita dalam Al-Qur’an*. Buku tersebut menjelaskan peran ratusan perempuan yang melatarbelakangi turunnya Al-Qur’an. Buku tersebut mengungkap sejarah perjalanan hidup perempuan pada zaman Nabi dan sebelumnya. Buku itu mengilhami saya untuk menulis buku tentang ulama perempuan. Pak Khasan menjelaskan bahwa perlu ada penguatan kapasitas terlebih dahulu sebelum melakukan pendidikan, pengajaran, pengabdian, dan penelitian yang responsif gender.

Saya bertugas sebagai penyuluh KUA di Malang dan bukan berasal dari akademisi. Terkadang mereka belum bisa menerima pendekatan bayani, apalagi jika menggunakan pendekatan irfani atau burhani. Kita sudah membawa ayat-ayat Al-Qur'an dan memberikan penafsiran baru terhadap ayat-ayat yang dianggap misoginis, namun mereka tidak bisa menerimanya. Saya ingin mendiseminasikan gagasan-gagasan yang ada di kampus ke masyarakat akar rumput. Bagaimana kita bisa mencocokkan ide-ide gender untuk masyarakat kampus dan masyarakat kampung?

2. **ISTIADAH:** Saya menantikan bagaimana PSGA bisa menjembatani pemikiran yang tidak tersentuh seperti disampaikan Prof Alim. Rachel Rinaldo menyatakan bahwa women have changed a lot, but men don't. Perempuan di Indonesia sudah maju sekali, sedangkan laki-lakinya secara *mind set* tidak maju. Hal itulah yang menyebabkan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender tidak bergerak. Ada beberapa laki-laki yang mendukung perempuan untuk masuk ke parlemen, namun jangan mengotak-atik produksi pengetahuan tentang chauvinisme. Saya mengikuti pengesahan UU TPKS melalui zoom dan ada banyak komentar yang menolaknya. Mereka yang berpikiran agak maju sedikit dianggap murtad atau orang yang menantang agama.

Media sosial sekarang menguasai kita. Orang yang populer di media sosial justru mengusung ideologi yang berbeda dengan kita. Ahli neurosains menyarankan untuk domestikasi perempuan karena itu lebih cocok dan diterima oleh otak. Kita juga seharusnya bisa melakukan hal—hal seperti itu. Di Indonesia ada 58 PTKI dan ratusan PTKIS dengan ratusan bahkan jutaan mahasiswa. Ibu penyuluh juga punya audiens jamaah. Kita bisa menyampaikan ide-ide ini kepada mereka. Islam sangat menghormati perempuan dan siapa saja yang tidak menghormati perempuan maka ia menantang Rasulullah. Kita harus merebut kembali narasi-narasi yang mendiskreditkan perempuan. Kita harus melakukan kerja-kerja yang disukai oleh generasi saat ini seperti podcast, Instagram, TikTok, sitcom, dan lainnya. Saya berharap Prof Alim dan Bu Yuni bisa datang ke tempat kami. Kami punya kajian rutin tentang ketahanan keluarga setiap hari Jumat.

3. **MUHAMMAD ZAKI (salah satu pengasuh Pesantren Sirojul Athfal Sukabumi):** Ulama berasal dari kata 'alimun-alimani-ulama.' Ulama adalah orang punya pengetahuan tentang banyak hal, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga ulama tidak secara spesifik merujuk pada laki-laki. Pada zaman Nabi, ada ulama dari kalangan perempuan Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan ribuan hadits. Pada zaman tabiin, ada sufi dari kalangan perempuan Rabiah Adawiyah. Ada banyak persoalan perempuan seperti haid, nifas, dan lainnya yang diputuskan oleh laki-laki dalam bahtsul masail. Saya berharap, para bunyai bisa terlibat atau dilibatkan dalam bahtsul masail sehingga mereka bisa memunculkan pengalaman dan perasaannya. Ulama bukan hanya laki-laki saja karena perempuan juga bisa menjadi ulama.

Hukum poligami adalah mubah, namun ada banyak yang berpendapat bahwa hukum poligami adalah sunnah. Dalil yang digunakan mereka adalah 'Fankihu ma thaba lakum mina al-nisa matsna wa tsulasa wa ruba.' Sebetulnya itu adalah ayat pembatasan karena pada zaman Jahiliyah orang punya istri hingga puluhan bahkan ratusan. Saya tidak setuju dengan praktik poligami karena kita juga harus melihat perasaan istri. Ibu juga punya tugas madrasatul ula, yang mendidik anak-anaknya.

YUNYANTI CHUZAIFAH:

Saya senang dengan adanya buku yang membahas tentang ulama perempuan. Penulis buku 100 sahabat laki-laki Nabi adalah orang lain, bukan Prof Azra. Menurutnya, itu adalah persoalan teknis, sedangkan saya menganggap itu adalah persoalan ideologis, bukan teknis. Teman-teman merasa sudah berusaha keras namun sepertinya belum ada perubahan. Seberapa kuat dampak riset-riset yang dilakukan? Karena itu riset-riset transformatif menjadi penting. Saya juga senang menangani 'hal-hal yang receh.' Saya sudah memberikan pelatihan di banyak PSGA dan berdebat dengan orang yang anti RUU TPKS, namun pandangan-pandangan bias masih kuat di masyarakat. Ada yang menyebut bahwa pandangan bias di masyarakat disebabkan sinetron Ikatan Cinta.

Saya kemudian menonton sinetron tersebut secara intens dan melacak penulis skripnya. Saya mengirimkan kepadanya melalui WA dan memintanya untuk mengoreksi bagian-bagian yang kurang tepat. Misalnya perkosaan dianggap hanya pelecehan seksual. Itu merusak pandangan masyarakat karena korban perkosaan menganggap dirinya hanya mengalami pelecehan seksual. Teman-teman juga perlu merespons 'hal-hal yang receh' namun punya dampak yang kuat seperti itu. Begitu juga dengan lagu Aisyah. Beliau adalah tokoh politik yang luar biasa. Namun lagu tersebut merejuvenasi citra Aisyah. Lagu tersebut menampilkan Aisyah dengan anak kecil yang punya pipi kemerah-merahan dan suka berlari-lari. Saya khawatir itu berkontribusi pada perkawinan anak. Teman-teman perlu merekonstruksi penulisan sejarah Islam dengan 'cara-cara yang receh.'

KHASAN UBADILLAH:

Pada awal 2022 kami membentuk Gugus Tugas Desa Layak Anak karena kasus kekerasan terhadap anak meningkat tinggi pada saat pandemi terutama di wilayah Solo—naik 300%. Kami melibatkan 360 peserta dan mengakses pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki, bukan menceramainya. Mereka kemudian menjadi tahu tentang banyak hal yang seharusnya tidak dilakukan dan perlu dilakukan untuk melindungi anak. Lalu muncul inisiatif untuk membuat Peraturan Desa Tentang Desa Layak Anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Semua itu tidak ada di desa. Kabupaten/Kota Layak Anak seringkali mengenyampingkan dan tidak pernah menyentuh desa padahal kita bisa melakukan pencegahan di desa-desa. Kami sebetulnya meniru apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Rumah KitaB.

Kita mengajak mereka untuk berbagi dan mereka kemudian menyadari apa-apa yang seharusnya mereka lakukan. Sebagian desa meminta kami untuk mendampingi membuat peraturan desa, forum anak, PATBM, dan lainnya. Namun ada satu desa yang sangat resisten dan tidak merespons itu sama sekali karena mereka menganggap apa yang sudah dilakukan sudah sangat baik—orang yang menggawangnya justru perempuan. Beberapa waktu lalu ada kasus pembunuhan seorang anak oleh kakaknya sendiri di desa tersebut. Dari kejadian itu mereka baru menyadari bahwa pengawasan dan perlindungan mereka terhadap anak sangat lemah. Mereka kemudian mendatangi kami dan mendalami apa yang sudah kita lakukan.

Kita tidak memosisikan mereka sebagai penerima informasi karena mereka adalah orang yang punya pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa. Kita bisa membantunya dengan mendengarkannya dan mentransformasikannya. Terkadang mereka harus dihadapkan dengan situasi yang membenturkan mereka dengan kenyataan sehingga kita

jangan meninggalkan mereka untuk berjalan sendiri. Bagaimana agar kampus bisa masuk ke masyarakat? Kita bisa melakukan banyak cara. Kita perlu menghargai dan memberi ruang kepada mereka sebagai orang yang punya pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa.

ALIMATUL QIBTIYAH:

Terkait strategi membumikan pemikiran ulama perempuan kampus di masyarakat kampung, kita mencoba menghilangkan *underestimate* audiens dakwah kita. Kita harus menggunakan strategi dakwah yang berbeda. Kita jangan menggunakan doktrin terus. Kita bisa menggunakan hasil penelitian tanpa harus menguraikan metodologi yang rumit. Saya menjadi penceramah di pengajian akbar—ada 1000-1500 jamaah- pada Ahad nanti. Saya harus menurunkan bahasanya. Kita tidak perlu menggunakan bahasa bayani, irfani, dan burhani. Kita cukup menyebutkan ayat dan haditsnya, dan hasil penelitiannya. Misalnya keluarga sakinah dan ketahanan keluarga. Keluarga sakinah akan bahagian jika tidak ada salah satu yang punya tugas yang banyak. Kita harus memilih kata-kata yang sama namun substansinya jangan dihilangkan. Kita menyuguhkan dalilnya, hasil penelitian lapangan, dan konsultasi dengan hati nurani. Jika sulit, bisa jadi kita yang belum paham dengan hal yang ada.

Dunia dakwah digital dikuasai oleh teman-teman yang tekstual-konservatif. Mereka tidak berpikir karena hanya copy-paste terjemahan Al-Qur'an dan Hadits saja tanpa melakukan riset terkait hal itu. Kita tentu tidak mau seperti itu. Kita juga harus melakukan riset tentang hal itu namun menggunakan bahasa yang sederhana. Kampus dan kampung akan bisa menjadi satu karena banyak orang kampung yang cerdas dan banyak orang kampus yang tidak cerdas juga. Jika menggunakan perspektif politik Undang-Undang, nama ketahanan keluarga sudah dipakai oleh kelompok sebelah. Kita harus berhati-hati menggunakan istilah ketahanan keluarga. Naskah akademik dan draf RUU Ketahanan Keluarga mengembalikan perempuan ke dalam ranah domestik. Kita mungkin bisa menggunakan istilah isu keluarga, bukan ketahanan keluarga.

Saya mengapresiasi semangat Mas Zaki—mengingatkan saya pada 20 tahun lalu. Di satu sisi perempuan tidak boleh poligami, tetapi di sisi lain perempuan harus mendidik anak. Itu tidak konsisten. Kita harus tegas. Teori persamaan: laki-laki dan perempuan itu sama, perbedaannya kecil sekali. Teori perbedaan: laki-laki dan perempuan itu banyak perbedaannya. Persamaan biasanya menggunakan istilah setara. Sementara perbedaan menggunakan istilah setara tapi berbeda. Misalnya, jika menggunakan teori persamaan, kepala keluarga biasa saja saja, laki-laki atau perempuan, asal ia mampu. Jika menggunakan teori perbedaan, tidak masalah laki-laki menjadi kepala keluarga, itu hanya ada di Kartu Keluarga sementara implementasinya adalah kolektif-kolegial. Itu hanya bersifat fungsional tidak hierarki.

Siapa yang lebih dimuliakan, ayah atau ibu? Tergantung, kita menggunakan teori persamaan atau perbedaan. Jika menggunakan teori perbedaan, ketika Nabi mengatakan 'Ibumu, ibumu, ibumu, ayahnya', bisa jadi kondisi perempuan dan laki-laki belum setara saat itu. Perempuan masih di sini sedangkan laki-laki sudah di sana. Nabi kemudian mengatakan 'Ibumu, ibumu, ibumu, ayahmu,' sehingga keduanya posisi yang sama dan sama-sama dimuliakan. Jika kita berangkat dari teori persamaan, ayah dan ibu punya posisi yang sama sehingga kesimpulan dari hadits 'Ibumu, ibumu, ibumu, ayahmu' adalah ibu lebih dimuliakan daripada ayah. Realitasnya, kita memuliakan ibu dan ayah secara

bersama-sama atau tidak? Bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan ketika Nabi mengatakan hal itu? Saya pribadi lebih suka bahwa ayah dan ibu sama-sama dimuliakan. Perempuan punya tugas yang berat dan melelahkan (wahnin ala wahnin). Karena itu, perempuan harus dibantu agar mereka tidak mengerjakan itu sendirian karena itu tidak bisa dipertukarkan. Jangan sampai 'Ibu kan madrasatul ula. Dia harus bertanggung jawab mengasuh. HP ibunya yang digunakan untuk belajar online karena madrasatul ula. HP-nya ayahnya enggak.' Tidak bisa seperti itu.

PESERTA PEREMPUAN (IIQ Jakarta): Pak Khasan menyebut, PSGA harus menyentuh tridarma perguruan tinggi. Apakah pendidikan responsif gender harus masuk ke dalam kurikulum atau sekadar mengadakan seminar? Mahasiswa kami adalah perempuan semua. Apakah itu sudah disebut adil gender?

KHASAN UBAIDILLAH: Goal kita adalah memang kurikulum yang responsif gender. Namun untuk menuju ke sana ada proses yang harus dilakukan dan diafirmasi oleh PSGA. Kita pertama-tama menanamkan perspektif ke semua pemangku kebijakan melalui pelatihan, diskusi, dan lainnya. Kita kemudian bisa menyusun RPS dan buku ajar responsif gender. Kita juga perlu menyusun SK tentang kurikulum yang responsif gender. Kita perlu membangun kapasitas dan juga kebijakan yang mendukung.

ALIMATUL QIBTIYAH:

Kurikulum adalah susunan mata kuliah. Ada mata kuliah yang secara eksplisit bernama gender seperti Islam dan Gender. Ada yang terintegrasi secara tersembunyi—menjadi perspektif. Misalnya harta suami dan istri dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dibagi sehingga itu tidak termasuk harta warisan. Laki-laki mendapatkan dua dan perempuan mendapatkan satu bagian. Perempuan tidak bersekolah maka biaya-biaya sekolah dikeluarkan menjadi haknya si perempuan—kalau tetap menggunakan dua banding satu. Kita jangan menggunakan strategi kompetitif. 'Siapa yang tahu tempat KUPI 2?' Jika menggunakan strategi kompetitif seperti itu, laki-laki pasti akan mengacungkan tangan. Kita bisa menggunakan strategi yang tidak kompetitif agar laki-laki dan perempuan juga terlibat seperti 'Silakan tuliskan tempat KUP 2 berlangsung.' Saya menulis tentang pedagogi feminis di Jurnal Perempuan. Kita mencoba mengimplementasikan isu PTRG dalam proses pembelajaran dan kurikulum. Kita memang harus membangun perspektif. PSW UIN Yogyakarta sudah mengintegrasikan itu dengan kurikulum yang ada pada 2000-an.

Bukan berarti sudah gender jika semuanya adalah perempuan. Itu disebut gender jika: *Pertama*, apakah sudah memperhatikan peran praktis-strategis perempuan atau belum. *Kedua*, apakah akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM) sudah diperhatikan atau belum. *Ketiga*, memperhatikan keragaman pengalaman perempuan. Jangan sampai mengklaim jilbab model ini setengah iman dan yang ini seperempat iman. *Keempat*, memperhatikan disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

MUFLIHA WIJAYATI: Kita tidak perlu memperdebatkan lagi apakah PSGA ulama perempuan atau tidak. Kita secara substantif harus bersetia pada tugas-tugas PSGA untuk memproduksi pengetahuan dan menjadikannya sebagai basis untuk melakukan transformasi sosial. PTRG adalah salah satu pintu masuk yang bisa dimanfaatkan untuk membuka ruang diskusi, berbagi pengalaman, dan bersetia pada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan.